

R^eplik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

“MENILIK BAYANGAN POLITIK KAMPUS: SAJIAN WARNA DAN PERAN MAHASISWA”

LAPORAN UTAMA

POLITIK KAMPUS SEBAGAI
PANGGUNG TUMBUHNYA
KESADARAN MAHASISWA

ANGKAT SUARA

FENOMENA MAHASISWA PASIF:
MENJAUH DARI PEMIRA,
ORGANISASI KEMAHASISWAAN,
DAN DINAMIKA POLITIK KAMPUS

PRO & KONTRA

GERAKAN POLITIK KAMPUS:
UNTUK SIAPA?



Hidup Mahasiswa!

KATA PENGANTAR

Salam Semangat Juang Pers Mahasiswa!

Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum yang juga tak lepas dari dunia hukum dan politik, terdapat sebuah ruang yang sangat penting. Hal itu ialah ruang belajar, berdinamika, keberanian hingga menyusun strategi layaknya seorang dewan di bangku senayan. Hal-hal seperti menerima perbedaan hingga menyusun gagasan sesuai dasar pikiran membuat hal itu menjadi layaknya sebuah ruang yang memiliki berbagai macam dampaknya.

Replik yang saya gagas ini menjadi sarana upaya kecil untuk membuka satu persatu sebuah pertanyaan yang sering terlintas di benak seorang mahasiswa. Saya dan teman teman mencoba mengurainya sedemikian rupa dimulai dari dinamika, fenomena, hingga banyaknya warna di dalam politik kampus serta saran kedepannya. Semua itu merupakan potret realita yang terjadi saat ini di kampus tercinta.

Kami percaya, melalui jemari tangan yang di ejawantahkan dalam replik ini bisa memantik mahasiswa untuk dapat berpikir lebih aktif, dinamis dan kritis juga peka terhadap lingkungan sekitar. Karena cepat atau lambat kita akan tergabung didalamnya.

Tapi sebagai penulis yang tak luput dari kekurangan, tentu saja ini bukan jawaban final, masih banyak diskusi maupun perdebatan yang bisa pembaca sampaikan, dan tentu saja itulah letak ruang dinamika yang membuka cakrawala bagi siapa saja.

Terima Kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa serta semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta ilmu dalam penyusunan Replik Volume II ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan replik ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan kami terima dengan senang hati sebagai pembelajaran dan perbaikan kedepannya. Semoga, Replik Volume II ini tidak hanya menjadi bahan bacaan, melainkan mampu menjadi jendela pikiran, sumber inspirasi dan kontribusi kecil yang bermakna bagi dunia, ilmu dan keadilan. Semoga Replik ini bisa menemani pembaca dalam berbagai hal mengenai Politik Kampus.

Akhir kata, Terima kasih.

Redaktur Pelaksana
Akhdad Saddam Arrummy

STRUKTUR ORGANISASI

- Pembina: Mochammad Azhar, S.H., LL.M.
- Dewan Redaksi: Adi Tri Prasetyo, Siska Utami, Nadia Yudistira Silalahi, Shella Amelia Putri, Hanifah Febri Annisa, Putri Restianingsih, Nur Sopiah, Devio Nabila Ernanta Arsianti, Calvin Syahputra Saragih
- Pemimpin Umum: Rizki
- Wakil Pemimpin Umum: Dhiyaa Ulhaq Musyaffa Kartika
- Sekretaris Umum: Syaqqina Fildzah Hanifa
- Bendahara Umum: Nor Chanifah Laila
- Pemimpin Redaksi: Fildzah Shafa Ghani
- Redaktur Pelaksana Media Online: M. Fajar Rusyidi
- Redaktur Pelaksana Artistik: Amellia Rachmayanti
- Redaktur Pelaksana Jurnal: Amando Sahata Sinaga
- Redaktur Pelaksana Replik Volume I: Amellia Rachmayanti
- Redaktur Pelaksana Replik Volume II: Akhmad Saddam Arrumy
- Redaktur Pelaksana Replik Volume III: Ibrena Maria Quinta Karo Karo
- Staf Redaksi: Tessa Vena Pasaribu, Dungo Robintang I. Situmeang, Dimas Irfak Tabrani, Ryan Anugerah Rafael
- Pemimpin PSDM: Tiara Raudhatul Jannah
- Staff PSDM: Aaliyah Davalyn Setiawan, Faqih Nuris Shiba, Anisa Kolda Kusumajati, Arinnda Meyputri, Alya Mufidah, Fauziah Kauri Muhajir, Jihan Nailah Rahmadina
- Pemimpin Litbang: Sonny Kusuma Wijayanto
- Staf Litbang: Gola Arpanji Cahyono, Nasywa Julia Tiaradevi, Elcha Erdiana Salsabila, Azarine Naila, Alda Hamidatuz Zahrah, Nabila Abhista Sahlaa, Aulia Yusuf Ramadhani Sindaru, Muhammad Rizki Juniarto, Dela Rahmatul Wafa
- Pemimpin Humas: Bening Fauziyyah Auliya Arifan
- Staf Humas: Chaezarani Hijrinalis, Hilda Hirziyani, Elisabeth Efriani, Petra Permana Putra, Ristianti Simatupang, Rahma Alfika, Erma Suryani Situmorang, Rieva Christy Sinaga
- Pemimpin Perusahaan: Fadilla Zahrah Maulidia
- Staf Perusahaan: Callysta Tsania Farah Arifin, Hasna Afifah Haris, Sapta Noferiantika, Restu Adha Wahidha, Ammara Essy Alya

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

"Politik Kampus Sebagai Panggung Tumbuhnya Kesadaran Mahasiswa"	5
--	---

LAPORAN KHUSUS

"Dibalik Peran Tersembunyi Ekstra Kampus"	8
--	---

KUPAS TUNTAS

"Peran Serta Kondisi Terkini Organisasi Ekstra dan Politik Kampus Terhadap Mahasiswa"	11
---	----

PRO & KONTRA

"Gerakan Politik Kampus: Untuk Siapa?"	17
--	----

ANGKAT SUARA

"Fenomena Mahasiswa Pasif: Menjauh dari Pemira, Organisasi Kemahasiswaan, dan Dinamika Politik Kampus"	20
--	----

SUDUT PANDANG

"Refleksi Serta Pembelajaran yang Tersirat dari Dinamika Politik Kampus"	26
---	----

LAPORAN *Utama*

“POLITIK KAMPUS SEBAGAI PANGGUNG TUMBUHNYA KESADARAN MAHASISWA”

Kampus bukan hanya ruang akademik untuk menuntut ilmu, melainkan juga arena pembelajaran demokrasi yang membentuk karakter kepemimpinan serta kesadaran kritis mahasiswa. Melalui dinamika politik kampus, mahasiswa belajar berorganisasi, menyuarakan pendapat, hingga mengasah keterampilan kepemimpinan.

Politik kampus kerap dipahami sebagai manifestasi gerakan mahasiswa yang berwujud pemerintahan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Lebih dari sekadar aktivitas organisasi, politik kampus adalah interaksi, diskusi, dan advokasi yang melibatkan mahasiswa serta pihak kampus dalam merespons isu-isu relevan dengan kepentingan bersama. Dalam berbagai publikasi akademik, politik kampus didefinisikan sebagai tata cara dan kebijakan yang mengandung nilai kepemimpinan untuk mengatur kehidupan mahasiswa. Peran mahasiswa di sini bukan hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pengambil keputusan, penyalur aspirasi, hingga pembentuk iklim sosial di kampus.

“Mahasiswa sebagai kelompok intelektual yang kritis memiliki peran sentral dalam mengawal jalannya demokrasi,” ujar salah satu mahasiswa dalam wawancara. “Kebebasan mereka untuk berekspresi dan berpartisipasi menjadi pondasi penting lahirnya gagasan inovatif dan perubahan sosial.”



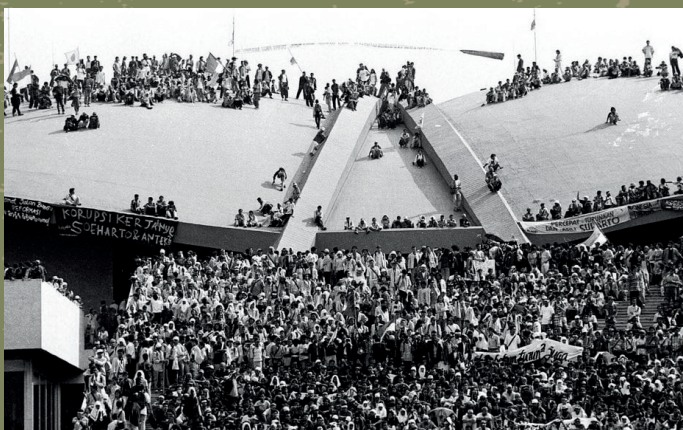
Berdasarkan riset, mahasiswa umumnya memandang politik kampus sebagai ruang pengembangan diri. Organisasi dianggap sebagai wadah untuk menggali potensi, melatih soft skills, sekaligus sarana menyalurkan suara masyarakat. “Organisasi adalah tempat untuk melatih diri, sehingga mahasiswa yang berorganisasi nantinya memiliki soft skill yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain,” ungkap salah satu hasil penelitian.

Pandangan serupa datang dari kalangan akademisi. Dr. Ghevarina dari FISIP UIN Jakarta menilai mahasiswa selalu menjadi ujung tombak perubahan. "Mahasiswa bukan hanya intelektual akademisi, tapi juga intelektual sosialis," ujarnya.

Hal senada ditegaskan Warfian Saputra, S.H., M.H. Menurutnya, politik kampus harus menjadi wadah bersih dari pengaruh kekuasaan maupun uang. "Mahasiswa adalah agent of change yang akan memimpin bangsa ini ke depan," tegasnya.

Sejarah mencatat, politik kampus di Indonesia memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Pada era Orde Baru, ruang gerak mahasiswa sempat dibatasi. Namun, keterbatasan itu justru memicu munculnya gerakan bawah tanah, diskusi-diskusi kritis, hingga aksi demonstrasi yang kelak menjadi motor gerakan Reformasi 1998.

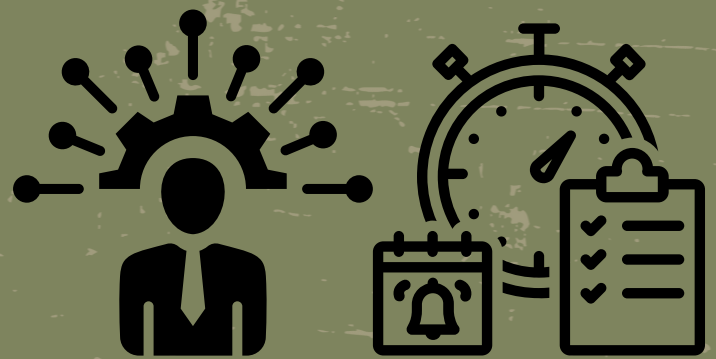
"Berkaca pada sejarah, ujung tombak perubahan khususnya di dunia politik selalu dilakukan mahasiswa," ujar Dr. Ghevarina dari FISIP UIN Jakarta. "Mahasiswa bukan hanya intelektual akademisi, tapi juga intelektual sosialis yang bergerak bersama masyarakat."



Sumber: Tirto.id

Kini, meski suasana politik nasional lebih terbuka, tantangan mahasiswa berbeda. Politik kampus dituntut tetap bersih dari pengaruh uang dan kekuasaan agar tetap menjadi ruang independen bagi pembelajaran demokrasi.

Keterlibatan dalam politik kampus menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa. Dari mengurus rapat harian, mengatur kegiatan besar, hingga memimpin organisasi, semua menjadi latihan nyata kepemimpinan. Mahasiswa belajar manajemen waktu, tanggung jawab, dan disiplin. Mereka dituntut untuk menepati janji, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengelola dana organisasi dengan transparan. Bagi banyak mahasiswa, pengalaman sederhana ini justru menjadi bekal utama ketika terjun ke dunia kerja.



"Mahasiswa yang aktif berorganisasi terbiasa memimpin tim, memotivasi anggota, dan mengambil keputusan yang berdampak luas," ungkap salah satu laporan akademik. "Ini adalah keterampilan yang jarang didapatkan di dalam ruang kelas." Selain kepemimpinan, kemampuan komunikasi mahasiswa berkembang pesat. Berbicara di depan forum, menyampaikan ide secara jelas, dan membangun argumentasi yang logis adalah keterampilan yang terasah lewat rapat, diskusi, maupun debat organisasi.

Untuk mendukung partisipasi mahasiswa, kampus menyediakan berbagai wadah organisasi. Organisasi internal seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa, hingga Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) berfungsi sebagai representasi resmi mahasiswa di lingkungan kampus.



Sumber: Kompasiana.com

Di sisi lain, organisasi eksternal seperti HMI, KAMMI, PMII, dan GMNI memberikan ruang yang lebih luas. Mereka menawarkan jaringan relasi yang melampaui batas kampus, sekaligus menghubungkan mahasiswa dengan gerakan sosial-politik di tingkat nasional.

Kedua jenis organisasi ini, internal dan eksternal, sama-sama berperan penting. Organisasi internal memberi pengalaman praktis dalam mengelola kampus, sementara organisasi eksternal memperluas wawasan serta menanamkan nilai solidaritas lintas universitas.

Politik kampus pada akhirnya adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Dari ruang-ruang rapat mahasiswa, lahir calon pemimpin masa depan yang terbiasa berpikir kritis, berani menyuarakan pendapat, serta memiliki tanggung jawab sosial.

Meski kerap diwarnai perdebatan, politik kampus tetaplah bagian tak terpisahkan dari dinamika pendidikan tinggi. Selama mahasiswa menjaga idealisme, politik kampus akan terus menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya.

Penulis:
M. Fajar Rusyidi

LAPORAN

Khusus

"DIBALIK PERAN TERSEMBUNYI EKSTRA KAMPUS"

Perguruan tinggi merupakan wadah bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi sesuai dengan bidang yang mereka minati. Perguruan tinggi menawarkan berbagai jajaran kurikulum yang jelas, terstruktur, dan jadwal kelas yang padat. Namun, saya percaya bahwa kehadiran mahasiswa sesungguhnya bukan hanya untuk mencapai prestasi-prestasi akademik dan mendapatkan gelar sarjana. Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari peran seorang mahasiswa.



Lebih daripada itu, mahasiswa memikul peran historis sebagai penggerak peradaban yang memiliki posisi strategis dalam dinamika sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat. Di setiap era perubahan sosial, politik, dan kebudayaan, mahasiswa selalu hadir sebagai pemantik, penantang, dan pemengaruh nalar kritis masyarakat.

Namun, pada realitanya, tak jarang ditemui mahasiswa-mahasiswa yang bersikap acuh tak acuh atau bahkan apatis terhadap dinamika kehidupan di sekitarnya. Ketika ditilik lebih lanjut, pengenalan dan penanaman peran mahasiswa sebagai penggerak peradaban tidak dapat dimiliki hanya dengan berlandaskan materi yang didapatkan dalam bangku perkuliahan. Di luar aktivitas akademik, terdapat dimensi lain, seperti organisasi intra kampus maupun ekstra kampus yang menjadi salah satu kunci dari pendalaman peran mahasiswa sesungguhnya.

Keterlibatan dalam organisasi intra kampus tampaknya sudah menjadi hal yang biasa di kalangan mahasiswa, atau bahkan terkadang, mahasiswa yang apatis dan berfokus hanya pada kegiatan akademik lebih dipandang dan diapresiasi. Sebaliknya, keterlibatan dalam organisasi ekstra kampus seringkali dianggap sebagai sesuatu yang liar atau bahkan dicap sebagai sarang agitasi dan pembangkangan, padahal ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tetapi siapa yang lebih mengenali bahwa sistem seperti itu telah dirancang untuk menciptakan pekerja bukan pemikir. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menggiring dan meremehkan kegiatan akademik.



Penguasaan ilmu yang mendalam itu penting, namun tugas mahasiswa itu lebih dari sekadar mengumpulkan prestasi akademik. Terdapat peran yang lebih besar yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Pada fase inilah terbentuk individu dengan karakter yang kritis dan mempertanyakan segala hal dan dinamika sosial yang ada di sekitarnya.



Di tengah-tengah gempuran dunia perkuliahan yang hanya mempersiapkan seseorang sesuai dengan keinginan pasar pekerjaan dan menciptakan sebagian besar mahasiswa yang cukup apatis terhadap realitas sosial, ekstra kampus hadir sebagai wadah dan ruang bagi para mahasiswa untuk memberikan pengajaran melalui diskusi ataupun kajian yang diadakan. Diskusi-diskusi kontroversial dan menarik yang diadakan oleh berbagai ekstra kampus, menekan mahasiswa untuk berpikir dan berdialektika dengan mahasiswa lainnya. Ekstra kampus hadir sebagai bagian dari wadah aktualisasi diri dan menjadi sarana yang akan membentuk karakter yang kuat di dalam diri mahasiswa. Ekstra kampus berperan besar dalam pembentukan kesadaran kolektif pada diri masing-masing mahasiswa terhadap realitas sosial yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat.

Ketika menanggapi sebuah isu atau permasalahan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara organisasi ekstra kampus dengan organisasi intra kampus, dimana pada organisasi intra kampus masih terdapat beban dan keterkaitan dengan birokrasi kampus serta kepentingan rektorat, sedangkan ekstra kampus lebih leluasa untuk bersuara memberikan tanggapan dan sikap tegas terhadap seluruh dinamika serta problematika kehidupan bernegara tanpa dibatasi.

Di balik peran ekstra kampus dalam pembentukan karakter kritis dalam diri mahasiswa, tak dapat dipungkiri bahwa keberadaannya memiliki stigmatisasi yang kerap memberikan citra buruk bagi setiap ekstra kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus sering kali dianggap sebagai pembuat onar, radikal, pragmatis, atau bahkan dianggap sebagai mahasiswa yang tidak memiliki niat untuk mengikuti perkuliahan. Tak jarang pula, ekstra kampus sering dikaitkan dengan kepentingan politik dari kader-kader yang tergabung di dalamnya. Stigmatisasi yang mengakar ini berimplikasi pada enggannya mahasiswa untuk turut berpartisipasi dalam ekstra kampus.



Sumber: SINDOnews Edukasi

Bahkan, mahasiswa yang memilih untuk terjun ke dalam ekstra kampus kerap dijauhi oleh mahasiswa lainnya karena dianggap memiliki kepentingan terselubung. Perilaku-perilaku yang menunjukkan kekhawatiran akan stigma "terlibat politik" menjadi aib yang seolah-olah menyiratkan bahwa politik adalah sesuatu yang kotor, hina, dan harus dihindari. Padahal kehidupan kampus pasti tidak akan terlepas dari dinamika politik baik secara kultural maupun struktural. Sudah seharusnya politik tidak hanya dipahami sebagai perebutan kekuasaan saja, melainkan upaya untuk menghadirkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan mahasiswa dalam ekstra kampus yang seringkali dikaitkan kontestasi politik kampus bukanlah kesalahan dan bukanlah sebuah ancaman. Keterlibatan mahasiswa dalam dinamika perpolitikan kampus merupakan indikator dari hidupnya dinamika intelektual di lingkungan kampus tersebut.

Sudah saatnya stereotip mahasiswa terhadap ekstra kampus diubah. Sudah selayaknya ekstra kampus dimaknai sebagai sebuah wadah yang potensial, bukan sebagai ancaman. Ekstra kampus bukanlah wadah yang mencetak perusuh ataupun agen kepentingan tertentu, melainkan ruang aktualisasi diri yang menawarkan berbagai macam ilmu dan sarana untuk meningkatkan karakteristik individu yang kritis dan peka terhadap realitas sosial. Sudah sepatutnya pula, mahasiswa keluar dari asumsi serta ketakutan semu terhadap "politik" dan mulai memandang keterlibatan mahasiswa dalam ekstra kampus sebagai bagian dari rangkaian pembentukan karakter dan proses intelektual.

Penulis:

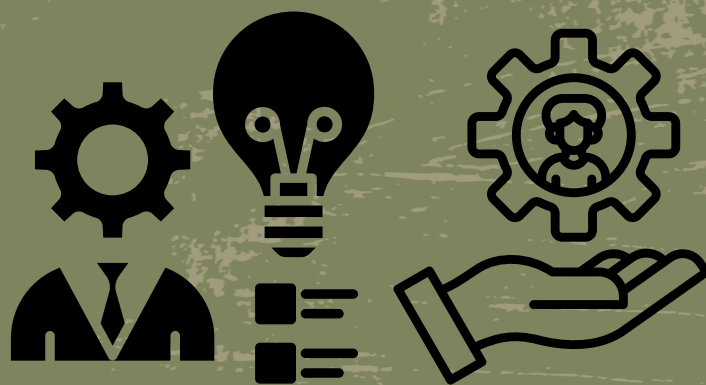
Rieva Christy Slnaga

KUPAS

Tuntas

"PERAN SERTA KONDISI TERKINI ORGANISASI EKSTRA DAN POLITIK KAMPUS TERHADAP MAHASISWA"

Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi merupakan suatu hal yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan masyarakat termasuk mahasiswa. Dalam dunia kampus, terdapat dua jenis organisasi yang cukup populer di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah organisasi ekstra kampus, yaitu organisasi yang berada di luar lingkungan kampus. Organisasi ini merupakan organisasi yang bersifat terbuka, pusat kegiatannya berada di luar kampus, dan sifat keanggotaannya konsensus dan kesamaan ideologi. Contohnya adalah HMI, GMNI, PMII, AIESEC, Novo Club, dan lain sebagainya.



Organisasi memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa, seperti meningkatkan kualitas diri, mengembangkan minat dan bakat, membuka wawasan ilmu pengetahuan, serta mendorong kreativitas. Hal ini penting karena mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang diharapkan mampu membangun bangsa ini menjadi lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Dunia perkuliahan menjadi tempat belajar yang menumbuhkan sikap mandiri, sehingga kebebasan dalam bidang akademik maupun non-akademik lebih terasa dibandingkan dengan tingkat pendidikan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, berbagai kegiatan mahasiswa, termasuk kegiatan ekstra kampus, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang mahasiswa.



Ruang lingkup kampus sering kali disebut sebagai miniatur negara, karena di dalamnya dinamika politik, sosial, dan akademik berinteraksi membentuk ekosistem yang kompleks. Dalam konteks perguruan tinggi, kehadiran organisasi ekstra kampus yang kerap memiliki afiliasi dengan gerakan sosial atau partai politik di luar kampus, menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut. Organisasi ini berperan sebagai wahana pendidikan politik bagi mahasiswa, yang tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam praktik demokrasi.

Mahasiswa secara historis dikenal sebagai agen kritik sosial dan berperan dalam mendorong perubahan di bidang demokrasi. Tingkat kesadaran mahasiswa terhadap politik dan demokrasi terus meningkat. Faktor utamanya adalah kemudahan dalam mengakses media dan teknologi yang membantu mereka mengerti berbagai isu politik, mulai dari daerah hingga tingkat nasional dan internasional. Mengutip dari Arifin & Firdaus, penguatan pola pikir demokratis di kalangan mahasiswa menjadi fondasi krusial bagi peningkatan kualitas partisipasi politik mereka. Kesadaran berdemokrasi ini tidak hanya terbatas pada hak memilih, tetapi juga pada tanggung jawab sebagai warga negara yang kritis dan aktif. Misalnya, adanya diskusi terbuka, debat, dan forum-forum pengembangan pemikiran demokrasi yang dapat semakin memperkaya wawasan dan kedewasaan berpolitik mahasiswa.

Namun, kesadaran demokrasi saat ini tidak merata di kalangan mahasiswa. Tantangan yang muncul salah satunya adalah rendahnya minat sebagian mahasiswa untuk terlibat aktif. Banyak dari mereka beranggapan bahwa aktivitas politik di kampus hanya akan memicu konflik atau bahkan mengganggu fokus akademik. Pandangan seperti ini tentu berpengaruh pada tingkat kesadaran politik mahasiswa, padahal hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari proses pembelajaran sebagai warga negara yang kritis. Selain itu, beberapa faktor lain seperti latar belakang sosial ekonomi, minat pribadi, serta dukungan lingkungan pendidikan juga turut membentuk dan memengaruhi tingkat pemahaman politik mahasiswa.

INSTITUTE FOR
DEVELOPMENT
AND
TRANSFORMATION



Mahasiswa masa kini menunjukkan partisipasi politik yang lebih variatif dan dinamis dibandingkan sebelumnya. Bentuk partisipasi mahasiswa dalam politik kampus saat ini lebih banyak diwujudkan dalam kegiatan advokasi kebijakan kampus, diskusi publik, dan kampanye isu tertentu melalui media sosial.

Saat ini, partisipasi merambah ke ruang digital, tak seperti era sebelumnya, dimana partisipasi identik dengan demonstrasi dan mimbar bebas. Saat ini mahasiswa lebih memilih menggunakan teknologi digital untuk mengendalikan opini, menyebarkan informasi, dan mengorganisir kampanye politik. Mengutip dari Blackboard Magazine, media sosial, seperti Twitter, Instagram, dan TikTok, telah membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat dan berbagi informasi secara lebih luas. Gerakan mahasiswa tidak lagi terpusat pada forum-forum konvensional di kampus, melainkan meluas ke dunia maya, hal ini memungkinkan mahasiswa untuk membangun gerakan dengan cepat dan melibatkan lebih banyak pihak.



Namun demikian, meski terdapat antusiasme, tingkat partisipasi aktif yang berkelanjutan masih bergantung pada berbagai faktor. Seringkali, keterlibatan mahasiswa hanya muncul pada momen-momen tertentu, seperti pemilihan umum kampus atau aksi unjuk rasa besar, lalu meredup setelah itu. Dinamika tersebut semakin diperumit oleh adanya perbedaan pandangan politik dan prioritas di antara mereka. Selain itu, tidak sedikit mahasiswa yang cenderung apatis karena menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor atau tidak relevan dengan cita-cita karier mereka.

Orientasi yang serba instan dan praktis juga membuat sebagian mahasiswa lebih tertarik pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung, seperti magang atau sertifikasi.

Partisipasi mahasiswa tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk terlibat secara optimal dalam politik kampus maupun organisasi ekstra kampus. Salah satu faktor utamanya adalah munculnya Kurikulum Merdeka yang secara signifikan menggeser prioritas dan alokasi waktu mahasiswa. Program-program dalam kurikulum ini, seperti magang, studi independen, dan proyek desa, kerap menyita waktu hingga satu semester penuh. Tidak mengherankan jika banyak mahasiswa lebih memilih mengikuti program tersebut karena terintegrasi langsung dengan nilai akademik dan dianggap lebih relevan dalam mempersiapkan karier masa depan. Di sisi lain, kurangnya pengakuan akademik kampus terhadap berbagai aktivitas organisasi ekstra kampus, seperti pelatihan kepemimpinan maupun pengabdian masyarakat semakin memperkuat persepsi bahwa kegiatan tersebut hanyalah beban tambahan tanpa memberikan dampak signifikan terhadap transkrip nilai.



**Kurikulum
Merdeka**



Sumber: Wikipedia



Di luar faktor struktural tersebut, tantangan juga datang dari stigma negatif yang melekat pada dunia politik, yang sering dianggap sarat dengan praktik korupsi dan kolusi. Hal ini menimbulkan keengganan mahasiswa untuk terlibat lebih jauh. Akar permasalahan tersebut semakin menguat akibat minimnya literasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peran organisasi ekstra kampus sebagai wadah fundamental dalam membentuk karakter, kesadaran kritis, dan kepemimpinan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pihak kampus dan organisasi untuk memperbaiki stigma tersebut melalui pendidikan politik yang konkret serta menunjukkan bahwa nilai-nilai organisasi sesungguhnya relevan dengan pengembangan kompetensi maupun karier mahasiswa di era modern.

Selain itu, keberadaan organisasi ekstra kampus semakin penting dan memiliki keunggulan tersendiri dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan jangka panjang. Organisasi ekstra kampus bukan sekadar tempat beraktivitas, melainkan juga sistem pelatihan yang kompleks dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tuntutan dunia kerja masa kini, di mana nilai akademik saja tidak cukup menjadi tolok ukur penerimaan.

Lulusan yang berkualitas bukan hanya dituntut menguasai pengetahuan dan teknologi di bidangnya, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi lisan maupun tulisan, kemampuan berpikir analitis dan logis, serta kapasitas untuk bekerja mandiri maupun dalam tim.

Organisasi ekstra kampus juga berperan strategis dalam menanamkan nilai-nilai pengembangan diri melalui beragam aktivitas yang mengasah kemampuan non-teknis (soft skills) mahasiswa. Berbeda dengan organisasi intra kampus yang lebih terikat pada struktur administratif dan kegiatan akademik, organisasi eksternal justru menawarkan ruang yang lebih fleksibel bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan bakat kepemimpinan, kreativitas, serta pola pikir inovatif. Organisasi ekstra kampus juga membangun jaringan (networking) yang kuat. Jaringan ini tidak hanya sebatas sesama mahasiswa, tetapi juga dengan alumni, aktivis, dan tokoh masyarakat. Koneksi ini sangat berguna, tidak hanya untuk karier, tetapi juga untuk membuka wawasan dan kesempatan baru.

Dalam jangka panjang, keterlibatan aktif di organisasi ekstra kampus menanamkan sikap profesional dan etos kerja yang sulit diperoleh hanya melalui perkuliahan. Data dari penelitian di beberapa universitas di Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif di organisasi ekstra kampus memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih tinggi serta kemampuan sosial yang lebih matang dibandingkan yang tidak terlibat.

Selain itu, keaktifan dalam organisasi juga meningkatkan semangat belajar dan kesejahteraan jiwa mahasiswa, yang semua hal ini mendukung kesuksesan mereka di masa depan baik dalam karir maupun kehidupan sosial.

Peran organisasi ekstra kampus terhadap mahasiswa saat ini dapat dilihat dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, organisasi ekstra kampus tetap menjadi wadah penting untuk pendidikan politik, membentuk mahasiswa yang kritis, berani, sekaligus berkarakter. Kehadiran organisasi ini juga mampu menanamkan kepemimpinan jangka panjang yang berharga bagi masa depan mahasiswa sebagai agen perubahan. Tidak hanya itu, organisasi ekstra kampus bertindak sebagai laboratorium demokrasi nyata di mana mahasiswa belajar berpikir kritis, berdebat secara sehat, serta mengelola perbedaan secara konstruktif.

Melalui proses kaderisasi yang berjenjang, mahasiswa tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis seperti manajemen proyek dan organisasi acara, tetapi juga mengembangkan soft skills yang penting, seperti kepemimpinan, teamwork, komunikasi, dan kemampuan networking. Semua pengalaman tersebut pada akhirnya memberikan keuntungan jangka panjang, karena nilai-nilai yang diperoleh mampu membentuk lulusan yang bukan hanya berprestasi di lingkungan kampus, tetapi juga tangguh, mudah beradaptasi, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

Namun, di sisi lain, tantangan seperti apatisme, stigma negatif, serta hambatan baik dari internal maupun eksternal membuat peran organisasi ekstra kampus tidak lagi seoptimal dulu. Minat dan partisipasi aktif mahasiswa dalam organisasi ini terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya kurikulum Merdeka yang padat dengan fokus pada sertifikasi dan SKS sehingga banyak menguras waktu dan energi mahasiswa. Kondisi ini diperparah dengan stigma negatif terhadap dunia politik yang dianggap kotor, korup, dan tidak relevan dengan karier, sehingga semakin menurunkan minat mereka. Selain itu, ketiadaan pengakuan akademik dari kampus terhadap kegiatan organisasi juga membuat mahasiswa merasa bahwa berorganisasi hanya menambah beban tanpa manfaat praktis. Akibatnya, partisipasi mereka cenderung bersifat sesekali dan sementara, biasanya hanya muncul pada momen tertentu seperti pemilu kampus atau aksi besar.

Menurut pendapat saya, keberadaan dan pengembangan organisasi ekstra kampus merupakan aspek krusial yang perlu diperkuat sekaligus difasilitasi oleh institusi perguruan tinggi. Selama ini, kita tidak bisa hanya menyalahkan mahasiswa yang sering dianggap apatis atau pragmatis. Masalah utamanya justru terletak pada kegagalan sistemik, baik dari pihak kampus maupun organisasi, dalam melakukan pembaruan identitas serta beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena itu, kampus perlu mulai serius mempertimbangkan langkah konkret, misalnya dengan mengintegrasikan kegiatan organisasi yang terstruktur ke dalam kurikulum melalui pengakuan SKS.

Dengan demikian, mahasiswa tidak lagi dihadapkan pada pilihan sulit antara fokus mengejar prestasi akademik atau mengembangkan diri melalui organisasi. Di sisi lain, organisasi ekstra kampus juga harus melakukan evaluasi diri dan melakukan perubahan yang lebih relevan. Mereka perlu mampu menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan dan proses kaderisasi yang dijalankan tetap memiliki keterkaitan dengan tantangan zaman sekaligus menjawab kebutuhan nyata mahasiswa masa kini.

Selanjutnya, penting bagi mahasiswa untuk memandang organisasi ekstra kampus sebagai peluang, bukan ancaman. Melalui keterlibatan yang sehat dan proporsional, mahasiswa tetap dapat berkontribusi dalam dinamika politik kampus tanpa harus mengorbankan prestasi akademik. Untuk itu, pihak kampus juga memiliki peran penting dengan memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan ekstra kampus, baik melalui pengakuan akademik, pembinaan berkelanjutan, maupun edukasi politik yang mendorong pola pikir kritis serta menumbuhkan kesadaran demokrasi yang sehat. Dengan adanya sinergi tersebut, organisasi ekstra kampus dapat berfungsi optimal sebagai wadah pembentukan generasi muda yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih maju dan demokratis.

Penulis:

Dela Rahmatul

PRO Kontra

“GERAKAN POLITIK KAMPUS: UNTUK SIAPA?”

Politik kampus selalu menjadi topik hangat dalam ruang diskusi mahasiswa. Ia seolah menempati posisi paradoksal. Di satu sisi dipandang sebagai wadah pembelajaran dan pemberdayaan, namun di sisi lain sering dianggap sekadar arena perebutan kekuasaan kecil-kecilan yang mencerminkan praktik politik nasional. Pertanyaan kuncinya kemudian muncul, gerakan politik kampus sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk membentuk kualitas pribadi mahasiswa, memperjuangkan kepentingan kolektif, atau justru sekadar menjadi panggung bagi kepentingan segelintir orang? Tulisan ini berupaya menelusuri dua sisi yang berbeda, yakni pandangan pro dan kontra guna memahami makna politik kampus secara lebih jernih.

Bagi sebagian kalangan, politik kampus dipandang sebagai ruang pengkaderan yang tak tergantikan. Dunia perkuliahan tidak hanya dimaksudkan untuk mengejar prestasi akademik, melainkan juga untuk membentuk kapasitas diri secara menyeluruh. Di sinilah politik kampus memainkan peran strategis, yang mana ia membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar memimpin, mengatur organisasi, menyusun program, sekaligus mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Kemudian, keterlibatan dalam politik kampus melatih mahasiswa berpikir kritis, bernegosiasi, berdebat dengan sehat, dan mengelola konflik. Pengalaman semacam ini tentu tidak bisa diperoleh hanya dari ruang kelas. Oleh karena itu, politik kampus tidak berhenti pada sekadar kontestasi jabatan, tidak menjadi laboratorium sosial yang menempah mahasiswa menghadapi realitas masyarakat yang lebih kompleks.



Bahkan, menurut Kompasiana yang menyebutkan bahwa politik kampus dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas kepemimpinan, wadah untuk mengekspresikan pandangan, serta sebagai pendorong perubahan di lingkungan kampus. Organisasi kemahasiswaan, dalam hal ini, berfungsi sebagai media pengembangan diri sekaligus penguatan integritas kepribadian. Dengan kata lain, politik kampus membuka jalan bagi mahasiswa untuk membentuk karakter sekaligus mengasah keterampilan sosial.

Selain untuk pengembangan diri, politik kampus juga berfungsi sebagai medium penyampaian aspirasi mahasiswa. Di banyak universitas, lembaga kemahasiswaan diberi ruang formal untuk menyuarakan pendapat dan merumuskan kebijakan internal. Keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), maupun organisasi intra lainnya memungkinkan mahasiswa menyalurkan suara kolektif mereka. Hal ini penting, sebab mahasiswa adalah bagian dari civil society yang dituntut untuk kritis terhadap setiap kebijakan yang ada. Pada lingkup kampus, politik mahasiswa diharapkan mampu mendorong terciptanya kebijakan akademik maupun non-akademik yang lebih berpihak pada kepentingan mahasiswa.



Namun, idealisme tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas. Tidak sedikit pihak yang menilai politik kampus hanya sebagai ajang perebutan jabatan. Fenomena ini biasanya muncul menjelang pemilihan ketua BEM atau lembaga serupa, di mana kampus dipenuhi manuver politik. Alih-alih memperjuangkan ide dan gagasan, mahasiswa justru sibuk membangun koalisi yang pragmatis, mencari dukungan, bahkan menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang manipulatif.

Dengan demikian, organisasi mahasiswa yang semestinya menjadi sarana pendidikan politik sering kali bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan kecil yang mereplikasi praktik politik nasional. Politik kampus tak jarang menyerupai kampanye politik dengan visi-misi kandidat, penggalangan dukungan, hingga intervensi terhadap kebijakan kesejahteraan mahasiswa.

Kritik lain juga muncul terkait motivasi sebagian mahasiswa yang terjun ke politik kampus bukan karena panggilan memperjuangkan aspirasi, melainkan demi kepentingan pribadi. Ada yang menjadikannya sebagai batu loncatan untuk membangun jejaring, mengincar prestise, atau sekadar menambah portofolio demi karier di masa depan. Orientasi semacam ini berpotensi menjauhkan politik kampus dari fungsi sejatinya sebagai ruang perjuangan bersama.

Padahal, mahasiswa memiliki tanggung jawab historis sebagai agen perubahan. Maksudnya, mahasiswa dapat berperan sebagai guardian of constitution, yang mengajukan kontrol kritis terhadap kebijakan melalui mekanisme demokrasi. Namun, peran strategis tersebut bisa terhambat ketika politik kampus lebih banyak dijalankan demi ambisi pribadi dibandingkan kepentingan bersama.



**Guardian of
Constitution**



Dari uraian pro dan kontra di atas, terlihat bahwa politik kampus ibarat dua sisi mata uang. Pada sisi positif, ia adalah wadah pengembangan diri sekaligus ruang aspirasi mahasiswa. Politik kampus memberi kesempatan untuk belajar demokrasi, kepemimpinan, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Ia membentuk karakter mahasiswa agar tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berdaya secara sosial dan politik.

Namun, sisi negatifnya juga tidak bisa diabaikan. Politik kampus berpotensi terjebak dalam praktik perebutan kekuasaan, manuver manipulatif, serta orientasi kepentingan pribadi. Jika hal ini lebih dominan, politik kampus tidak hanya kehilangan makna sejatinya, melainkan juga menimbulkan apatisme di kalangan mahasiswa. Maka dari itu, kunci keberhasilan politik kampus terletak pada bagaimana mahasiswa memaknainya. Jika dipahami sebagai ruang belajar dan perjuangan kolektif, politik kampus akan memberi manfaat besar bagi semua kalangan. Tetapi jika yang lebih dominan adalah ego dan ambisi pribadi, ia hanya akan menjadi cermin buruk dari politik praktis.

Akhirnya, pertanyaan "gerakan politik kampus: untuk siapa?" menemukan jawabannya. Politik kampus seharusnya untuk mahasiswa secara keseluruhan, bukan hanya segelintir orang. Ia adalah ruang demokrasi kecil namun penuh arti, yang membentuk arah generasi penerus bangsa. Tugas mahasiswa hari ini adalah mengembalikan politik kampus ke rel yang benar, agar tidak sekadar menjadi panggung perebutan jabatan, tetapi menjadi wahana perjuangan untuk sesama.

Penulis:

Dungo Robintang I. Situmeang

ANGKAT *Suara*

"FENOMENA MAHASISWA PASIF: MENJAUH DARI PEMIRA, ORGANISASI KEMAHASISWAAN, DAN DINAMIKA POLITIK KAMPUS"



PASSIVE STUDENTS

Di tengah riuhnya dinamika politik kampus, muncul fenomena menarik yang belakangan semakin mencolok: semakin banyak mahasiswa memilih diam. Mereka menjauh dari Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira), enggan ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa), dan lebih memilih berdiri sebagai penonton di pinggir arena. Fenomena ini bukan sekadar soal "malas berorganisasi", melainkan sebuah cerminan pergeseran paradigma generasi muda terhadap konsep kepemimpinan dan representasi aspirasi. Padahal, kampus sering disebut sebagai miniatur negara, tempat ideal untuk melatih kepemimpinan, berpikir kritis, dan membangun kesadaran sosial. Namun, kini justru banyak mahasiswa yang memilih menjauh. Pertanyaannya, mengapa hal ini terjadi, dan apa dampaknya bagi masa depan demokrasi kita?

Hasil survei LPM Manunggal Undip (2010) terhadap 282 responden mengungkap fakta mencolok, 84% mahasiswa Undip tidak mengikuti organisasi ekstra kampus dan 62% responden menyetujui keberadaan politik kampus, namun ironisnya, hanya 16% yang benar-benar aktif. Sebuah kesenjangan besar antara kesadaran dan partisipasi mahasiswa.



Data terbaru dari sebuah studi oleh Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Universitas Indonesia (PKPP-UI) pada 2022 juga menegaskan tren yang serupa: kurang dari 30% mahasiswa aktif mengikuti Pemira di kampus mereka, dan angka ini terus menurun setiap tahunnya. Banyak organisasi mahasiswa kini menghadapi kesulitan hingga terseok-seok merekrut anggota baru, bahkan untuk sekedar mengisi kursi kepemimpinan yang dulunya dianggap prestisius.

Fenomena ini bukan hanya masalah ketidakhadiran secara fisik, melainkan juga bentuk ketidakpedulian terhadap isu-isu kampus krusial yang seharusnya menjadi perhatian. Misalnya, kebijakan kampus yang memengaruhi biaya kuliah, fasilitas akademik, dan kualitas pendidikan seringkali luput dari sorotan mahasiswa. Seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari tanggung jawab sosial dan politik di lingkungan kampus.

Salah satu faktor penyebab utama di balik fenomena ini adalah pergeseran cara pandang Generasi Z, kelompok usia yang mendominasi populasi mahasiswa saat ini. Memiliki karakteristik unik yang membentuk pandangan mereka terhadap politik kampus. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang tumbuh dalam iklim politik yang keras dan lebih konfrontatif, Generasi Z dibentuk oleh era digital yang sarat dengan keterbukaan informasi dan kecepatan perubahan. Dibesarkan dalam budaya instan dan hasil nyata, membuat Generasi Z cenderung pragmatis, tidak sabar dengan proses panjang, dan lebih memilih fokus pada hal-hal yang memberi dampak langsung terhadap diri mereka. Politik kampus dan organisasi ekstra, dengan segala perdebatan panjang dan konflik internalnya, dianggap terlalu melelahkan dan berlarut-larut.



Dunia digital memberikan akses tak terbatas pada informasi, dari isu-isu global hingga influencer yang membahas topik-topik niche. Ini membuat perhatian mahasiswa terpecah. Isu-isu lingkungan global, hak asasi manusia, atau tren gaya hidup di media sosial seringkali terasa lebih relevan dan menarik bagi mereka dibandingkan "politik kampus" yang dianggap rumit dan penuh drama internal.



Dr. Rizal Ramli, seorang pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat, Generasi Z cenderung memandang politik sebagai sesuatu yang toxic atau penuh drama. Mereka melihat perpecahan, intrik, dan konflik yang seringkali mengiringi aktivitas politik, baik di tingkat nasional maupun kampus, dan memilih untuk menghindarinya demi ketenangan pribadi atau fokus pada pengembangan diri.

Namun, faktor psikologis dan lingkungan sosial juga memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap politik kampus. Pengaruh ini datang dari berbagai sumber, mulai dari keluarga, teman sebaya, hingga kebijakan internal kampus itu sendiri. Beberapa mahasiswa dibesarkan dalam keluarga yang antipati terhadap politik, menganggapnya sebagai sumber masalah atau buang-buang waktu. Pengalaman traumatis orang tua atau kerabat dengan politik di masa lalu dapat menanamkan persepsi negatif sejak dini.

Selain itu, lingkungan pertemanan juga menjadi katalis penting. Jika mayoritas teman sebaya tidak tertarik pada politik kampus dan memilih apatis, seorang individu mungkin merasa aneh atau outlier jika menunjukkan minat. Sehingga, kecenderungan untuk ikut terlibat pun mengecil.



Budaya kampus yang kurang suportif terhadap aktivitas mahasiswa di luar akademik juga dapat menjadi faktor pembentuk pola ini. Kampus yang terlalu menekankan pada aspek akademik semata, tetapi minim menyediakan ruang bagi diskusi kritis, organisasi yang berdaya, atau inisiatif mahasiswa, secara tidak langsung mengirimkan pesan bahwa partisipasi di luar kelas kurang dihargai. Ditambah lagi, birokrasi kampus yang rumit, minimnya dukungan pendanaan, hingga intervensi berlebihan dari pihak birokrasi dalam urusan internal mahasiswa juga seringkali memudarkan semangat mahasiswa.

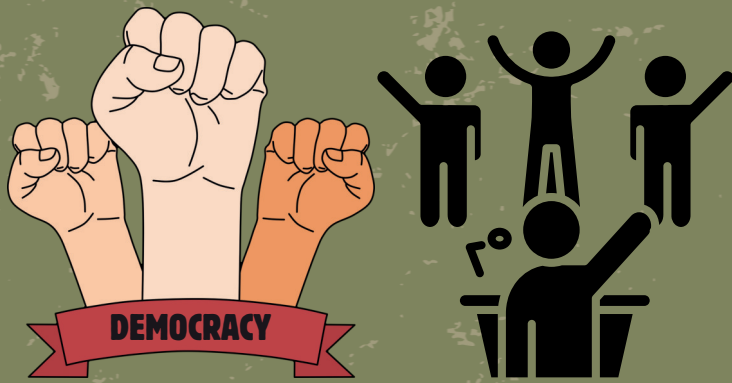
Menurut Dr. Anita Sari, seorang psikolog pendidikan menjelaskan, "Ketika mahasiswa merasa bahwa suara mereka tidak didengar, atau bahwa upaya mereka tidak akan menghasilkan perubahan nyata, mereka akan cenderung menarik diri. Ini adalah bentuk kekecewaan dan rasa tidak berdaya yang bisa berkembang menjadi apatisisme."

Pernyataan ini menggambarkan kenyataan yang terjadi di banyak kampus saat ini. Ada jarak antara mahasiswa dan ruang-ruang pengambilan keputusan, jarak yang semakin lebar ketika politik kampus gagal berbicara dalam bahasa generasi digital yang kini lebih memilih mengekspresikan opini melalui media sosial daripada forum senat mahasiswa.

Tetapi kita juga perlu melihat fenomena ini dari perspektif ekonomi dan sosial. Generasi mahasiswa saat ini menghadapi realitas persaingan kerja yang semakin ketat dan mahal biaya hidup. Fokus mereka lebih banyak diarahkan pada mengamankan masa depan ketimbang berpartisipasi dalam politik kampus yang manfaatnya belum terasa konkret. Banyak yang memilih bekerja paruh waktu, mengikuti kursus tambahan, atau membangun portofolio digital ketimbang duduk berdebat dalam forum senat mahasiswa. Hal ini bukan berarti mereka apatis terhadap perubahan, melainkan lebih memilih jalur "individualis" untuk mencapainya.

Namun, meski tren ini mengkhawatirkan, politik kampus tidak pernah kehilangan relevansinya dan penting untuk diingat mengapa politik kampus itu justru esensial. Politik kampus bukan hanya tentang Pemira atau demonstrasi; tetapi adalah arena belajar yang tak ternilai harganya bagi pembentukan karakter dan kompetensi mahasiswa.





Kampus adalah laboratorium demokrasi, tempat mahasiswa dapat belajar dan memahami proses pengambilan keputusan, negosiasi, manajemen konflik, dan kepemimpinan. Melalui organisasi, mereka belajar mengelola sebuah organisasi, menyusun program, dan bekerja dalam tim. Dalam Pemira, mereka belajar tentang hak pilih, transparansi, dan akuntabilitas para pemimpin.

Data menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan politik kampus cenderung memiliki kemampuan problem-solving yang lebih baik, keterampilan komunikasi yang lebih kuat, dan jaringan profesional yang lebih luas setelah lulus. Mereka juga lebih cenderung menjadi warga negara yang aktif dan berkontribusi positif di masyarakat.

Politik kampus juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kebijakan birokrasi. Ketika mahasiswa aktif bersuara, mereka dapat menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan mahasiswa. Tanpa partisipasi aktif, kampus dapat menjadi otoriter, dengan keputusan-keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi mahasiswa.

Namun, di sisi lain, politik kampus juga perlu berbenah. Generasi Z menuntut model politik yang lebih inklusif, transparan, dan adaptif. Jika organisasi mahasiswa gagal menghadirkan relevansi dan manfaat nyata, mereka akan semakin ditinggalkan. Politik kampus harus memanfaatkan teknologi dan ruang digital sebagai kanal utama komunikasi dengan mahasiswa, sekaligus menghilangkan stigma lama bahwa organisasi hanyalah arena perebutan kekuasaan.

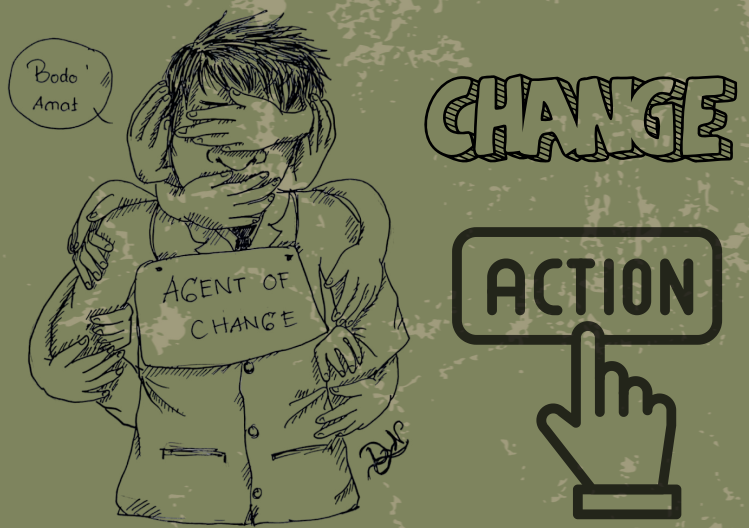
Transformasi digital telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi dengan informasi, termasuk soal politik kampus. Jika dahulu diskusi politik dilakukan melalui forum fisik, majalah dinding, atau debat terbuka, kini percakapan itu pindah ke ruang-ruang digital. Namun, alih-alih meningkatkan partisipasi, justru terjadi paradoks: informasi semakin banyak, tetapi keterlibatan semakin menurun.

Di platform seperti TikTok, Instagram, atau Twitter (X), politik kampus hanya muncul sebagai konten viral sesaat, seringkali dikemas secara satir atau penuh drama. Mahasiswa lebih tertarik menonton video singkat berdurasi 30 detik ketimbang mengikuti debat calon ketua BEM selama dua jam. Algoritma media sosial juga memperkuat pola ini, konten dengan interaksi tinggi akan terus didorong ke beranda, sementara isu-isu substansial yang kurang menarik "klik" akan terkubur. Akibatnya, mahasiswa lebih sering terpapar pada konflik internal organisasi atau "gosip politik" daripada memahami substansi kebijakan kampus itu sendiri.

Padahal media sosial seharusnya bisa menjadi peluang yang ampuh untuk komunikasi publik kampus dan organisasi mahasiswa justru tersembunyi di sini. Jika dimanfaatkan dengan lebih cerdas, teknologi dapat menjadi alat ampuh untuk merevitalisasi politik kampus. Organisasi mahasiswa bisa memanfaatkan algoritma untuk membangun narasi positif, menyajikan konten kreatif tentang program kerja, dan mengedukasi mahasiswa mengenai pentingnya Pemira melalui kampanye digital yang relevan. Bahkan, kampus dapat mengintegrasikan platform interaktif seperti aplikasi voting online untuk mempermudah proses partisipasi.

Transformasi ini mendesak ruang-ruang di organisasi mahasiswa untuk mengembalikan semangat para mahasiswa. Karena sejatinya fenomena mahasiswa pasif ini adalah pukulan telak bagi idealisme pendidikan tinggi yang seharusnya mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang kritis dan berdaya.

Dari perspektif pribadi, saya bisa memahami alasan di balik sikap pasif ini. Beban akademik yang tinggi, tekanan untuk cepat lulus dan mencari kerja, serta persepsi negatif terhadap politik secara umum, semuanya berkontribusi pada penarikan diri mahasiswa dari dinamika kampus. Mahasiswa saat ini juga menghadapi persaingan ketat di dunia kerja dan mungkin merasa bahwa fokus pada pengembangan hard skill lebih penting daripada soft skill yang didapat dari organisasi.



Sumber: Kopikir!

Namun, dari sisi lain, saya melihat ini sebagai ancaman serius bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Kampus adalah benteng terakhir bagi pemikiran kritis dan idealisme. Jika mahasiswa di level ini sudah apatis, bagaimana kita bisa berharap mereka akan menjadi agen perubahan yang efektif di masyarakat luas? Ketidakpedulian terhadap politik kampus adalah cerminan awal dari ketidakpedulian terhadap politik negara. Ini membentuk generasi yang mudah diombang-ambingkan, kurang peka terhadap isu sosial, dan cenderung follower daripada leader.

Kita sedang menghadapi krisis relevansi yang nyata antara politik kampus dan generasi muda. Namun, memilih diam bukanlah solusi. Jika ruang-ruang demokrasi di kampus dibiarkan kosong, ia akan diisi oleh segelintir orang dengan kepentingan tertentu, dan mahasiswa lainnya kehilangan kesempatan untuk bersuara.

Pada akhirnya, penting bagi kampus untuk secara proaktif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi mahasiswa, bukan hanya sekadar menyediakan wadah. Birokrasi kampus harus lebih transparan, memberikan otonomi yang lebih besar kepada organisasi mahasiswa, dan mengapresiasi setiap inisiatif mahasiswa. Mahasiswa sendiri juga harus keluar dari zona nyaman. Ingatlah bahwa pendidikan bukan hanya tentang ijazah, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Kita memiliki privilese untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan dengan privilese itu datanglah tanggung jawab untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan. Mari saatnya bangkitkan kembali semangat idealisme mahasiswa, demi almamater yang lebih hidup dan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Penulis:
Faqih Nuris Shiba

SUDUT Pandangan

"REFLEKSI SERTA PEMBELAJARAN YANG TERSIRAT DARI DINAMIKA POLITIK KAMPUS"

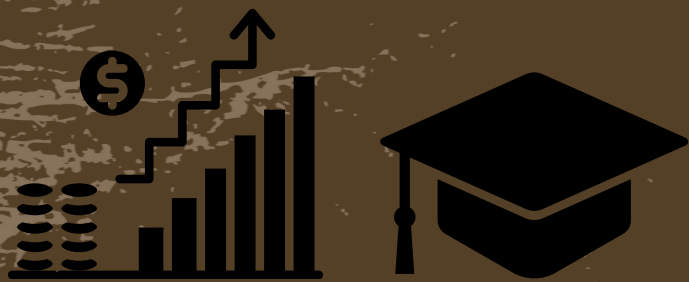
Berita mengenai pemerintah yang tidak acuh terhadap kesejahteraan rakyat dan kerap mengambil hak rakyat, seolah menjadi asupan sehari-hari bagi telinga dan mata masyarakat. Seiring berjalannya waktu, rasa percaya sudah jarang ditemukan pada setiap masyarakat dan tergantikan dengan prasangka buruk yang sering dilayangkan. Memudarnya rasa percaya dan meningkatnya prasangka buruk menjadikan masyarakat sulit untuk berpikir menggunakan sudut pandang lain yang menyebabkan citra politik menjadi tidak baik akibat lingkaran ketidakpercayaan yang sulit diputus.

Dalam pandangan publik, politik sudah melekat dengan kata "kotor", dianggap penuh tipu daya, selalu membul, dan mendahulukan kepentingan individu di atas kepentingan rakyat. Persepsi ini tentu tidak lahir tanpa sebab, melainkan timbul karena berbagai kasus yang disiarkan media mengenai praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta keputusan-keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun, banyaknya kasus yang disebabkan oleh politik, bukan berarti politik bisa dicap kotor.

Jika dilihat dari kacamata akademik, politik memiliki makna yang lebih luas dari perebutan kekuasaan yang sering dipandang negatif. Menurut Budiardjo Miriam "Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik". Artinya, politik pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Ini berarti setiap orang tidak bisa lepas dari politik karena politik menjadi instrumen penting yang mengatur kehidupan bernegara.



Politik senantiasa bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia. Misalnya, ketika berbicara mengenai kebutuhan pokok, hal tersebut memiliki kaitan dengan kebijakan ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Hubungan politik dan kehidupan manusia juga dapat ditemukan pada pendidikan, kesehatan, sosial, dan masih banyak hal lain yang bersinggungan dengan politik. Bahkan dalam lingkup kecil, seperti pengambilan keputusan di suatu kelompok, politik hadir dalam bentuk musyawarah. Ini membuktikan bahwa politik hadir tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga terdapat implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia.



Kesadaran bahwa politik selalu berkaitan dengan hampir seluruh aspek kehidupan manusia inilah yang seharusnya ditanamkan pada setiap masyarakat, termasuk pada kalangan mahasiswa. Namun, keadaan nyata di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai politik kampus masih beragam. Terdapat mahasiswa yang menilai politik kampus itu hanyalah ajang perebutan posisi dalam organisasi, ada juga mahasiswa yang menilai politik kampus tidak jauh berbeda dengan politik yang dilakukan di lingkup yang lebih besar, yang penuh dengan bualan. Pandangan-pandangan yang seperti ini akan memunculkan sikap apatis jika tidak segera diluruskan.

Politik kampus seharusnya menjadi wadah pembelajaran demokrasi yang sangat penting bagi mahasiswa. Melalui politik kampus, mahasiswa dapat memetik ilmu mengenai pengambilan keputusan, kepemimpinan, hingga mengatasi konflik. Menurut Kompasiana.com, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan politik di kampus dapat memberikan bekal keterampilan sosial dan kepemimpinan yang bermanfaat untuk masa depan. Ini berarti politik kampus bukan sekadar perebutan posisi, melainkan menjadi sarana untuk membentuk pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan memiliki rasa peduli terhadap kepentingan bersama.

Implikasi dari pengetahuan politik kampus yang positif adalah timbulnya kesadaran mahasiswa untuk memanfaatkan ruang tersebut secara maksimal. Tidak hanya menjadi pihak pasif, tetapi ikut berperan dalam setiap proses yang sedang terjadi. Dengan begitu, mahasiswa bisa merasakan manfaat, seperti menyelesaikan masalah menggunakan pemikiran yang sudah diasah menjadi kritis. Hal ini tentu akan berguna disaat mahasiswa menginjakkan kaki di dunia kerja maupun kehidupan masyarakat nantinya.



Mahasiswa kerap disebut sebagai agent of change atau agen perubahan. Julukan ini ada karena sejarah bangsa Indonesia yang membuktikan bahwa mahasiswa memang berperan penting dalam mendorong perubahan pada hal sosial dan politik, seperti pada peristiwa 1998, rezim Orde Baru berhasil digulingkan berkat peran mahasiswa. Sejarah tersebut membuktikan bahwa mahasiswa bukan hanya intelektual, melainkan juga mampu membuat perubahan besar. Mahasiswa dapat memainkan kembali peran tersebut dengan mengoptimalkan politik kampus.

Pada akhirnya, kesadaran politik yang terbentuk sejak berada di lingkungan kampus akan memberikan kontribusi yang nyata bagi kehidupan bernegara. Mahasiswa yang paham akan politik cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berani untuk menyuarkan keadilan. Dengan demikian, politik tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kotor, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa meski politik sering dipandang negatif, sejatinya politik adalah instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Politik selalu berkaitan dengan kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pengambilan keputusan di lingkungan kecil sekalipun. Pengetahuan mahasiswa mengenai politik kampus berperan besar dalam menentukan cara mereka mengartikan politik itu sendiri. Mahasiswa memiliki peluang menjadi agen perubahan yang mampu membawa bangsa Indonesia berlayar ke arah yang lebih baik melalui pemahaman dan praktik politik yang sehat.



Sumber: Klikdinamika.com

Optimalisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan meningkatkan literasi politik mahasiswa melalui seminar, kajian rutin, bahkan diskusi. Optimalisasi dapat juga dilakukan dengan membangun budaya politik sehat di lingkungan kampus sehingga citra politik kampus perlahan bisa membaik. Apabila Langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, maka mahasiswa dapat memahami politik dalam arti formal serta mampu mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

Penulis:

Elisabeth Efriani



LPM GEMA KEADILAN

AKTIF, DINAMIS, KRITIS

GEDUNG PROF. PURWAHID PATRIK FAKULTAS HUKUM LT. 2
JALAN PROF SOEDARTO SH, TEMBALANG
KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH
50275